

FAKTOR- FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENERIMAAN RETRIBUSI SAMPAH DI KABUPATEN BADUNG

I Nengah Jaya¹
Made Kembar Sri Budhi²
A.A.I.N Marhaeni³

^{1,2,3}Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Udayana, Bali, Indonesia
e-mail: nengahjaya@yahoo.co.id

Abstract: Factors Affecting the Garbage Retribution Revenue of Badung District. The purpose of this study was to determine the factors that have impact to the garbage retribution revenue of Badung District. The data used is primary data from questionnaires. The analysis technique used is descriptive analysis and path analysis. Variable used is the level of quality of service, ability to pay, garbage levy rates, willingness to pay, garbage levy receipts. The results of this study indicate that the level of quality of service, ability to pay, and garbage levy rates simultaneously have positive and significant effect on WTP trash and positive and significant impact on the acceptance of waste retribution. The quality of service levels directly influence the acceptance of waste retribution and indirect influence through the willingness to pay of garbage. Ability to pay, levy rate has a direct influence on the acceptance of waste retribution and not directly through the willingness to pay significantly garbage .

Keywords : quality of service level, ability to pay, willingness to pay, rates and rubbish retribution receipts

Abstrak: Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Retribusi Sampah Di Kabupaten Badung. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan retribusi sampah di kabupaten Badung. Data yang digunakan adalah data primer dari kuisioner. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis jalur dan analisis deskriptif. Variabel yang digunakan adalah kualitas tingkat pelayanan, kemampuan membayar, tarif retribusi sampah, kemauan membayar, penerimaan retribusi sampah. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas tingkat pelayanan, kemampuan membayar, dan tarif retribusi sampah secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemauan membayar sampah dan berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan retribusi sampah. Kualitas tingkat pelayanan berpengaruh langsung terhadap penerimaan retribusi sampah dan berpengaruh tidak langsung melalui kemauan membayar sampah. Kemampuan membayar, tarif retribusi memiliki pengaruh langsung terhadap penerimaan retribusi sampah dan tidak langsung melalui kemauan membayar sampah secara signifikan.

Kata kunci : kualitas tingkat pelayanan, kemampuan membayar, kemauan membayar, tarif, dan penerimaan retribusi sampah

PENDAHULUAN

Pengelolaan sampah tidak bisa lepas juga dari 'pengelolaan' gaya hidup masyarakat. Oleh karena itu, para perencana pembangunan harus selalu melibatkan perhitungan lingkungan (*environmental accounting*) ketika merumuskan kebijakan-kebijakan. Salah satu cara yang telah ditempuh oleh Pemerintah Kabupaten Badung dalam upaya mengatasi masalah sampah di Kabupaten Badung adalah dengan cara meningkatkan pelayanan infrastruktur, khususnya menangani sektor persampahan. Dalam teknis penanganannya, keterlambatan dalam penanganan sampah sampai saat ini masih menjadi permasalahan serius bagi pemerintah Kabupaten Badung. Volume produksi

sampah yang sudah dan belum tertangani di Kabupaten Badung tahun 2012 akibat dari aktivitas masyarakat dapat dilihat pada Tabel 1.

Seperti yang terlihat pada Tabel 1 volume produksi sampah di Kabupaten Badung tahun 2012 tercatat sebanyak 1287 M³ per harinya, volume produksi sampah ini terdiri dari 903 M³ perhari merupakan volume sampah yang dapat ditangani dan sisanya sebanyak 384 M³ perhari merupakan volume sampah yang belum tertangani dan dibuang ke pekarangan masyarakat.

Berdasarkan permasalahan yang telah diidentifikasi di atas, maka rumusan masalah penelitiin ini adalah faktor-faktor apakah yang mempengaruhi penerimaan retribusi sampah di kabupaten Badung?

Tabel 1.
Volume Produksi Sampah yang sudah dan Belum Ditangani
di Kabupaten Badung Tahun 2012

No	Kecamatan	Uraian	Produksi Sampah m ³ /hari	Ditangani	Belum Ditangani
1	Kuta Selatan		249	205	
2	Kuta		271	256	
3	Kuta Utara		217	192	
4	Mengwi		276	144	
5	Abiansemal		205	12	
6	Petang		69	8	
		Sampah dimusnahkan dengan incenerator		72	
		Sampah <i>trass track</i>		14	
		Volume sampah dibuang di pekarangan masyarakat			384
Jumlah			1287	903	384

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bali, 2013

KAJIAN PUSTAKA

Definisi Variabel

Keputusan MenPan No.81 tahun 1993 menyatakan bahwa pelayanan umum adalah segala bentuk pelayanan yang diberikan oleh pemerintah pusat/daerah dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat, dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya menurut Wicaksono, Bambang, dan Dianita (2006), kemampuan membayar adalah kemampuan seseorang untuk membayar jasa pelayanan yang diterimanya dan kemampuan ini disesuaikan dengan besarnya penghasilan. Semakin besar penghasilan seseorang atau sebuah rumah tangga, maka akan semakin tinggi pula tingkat kemampuan membayarnya terhadap sesuatu keperluan atau pengutipan tertentu. Kemauan membayar merupakan suatu nilai di mana seseorang rela untuk membayar, mengorbankan atau menukarkan sesuatu untuk memperoleh barang atau jasa (Widaningrum, 2007). Definisi ini sejalan dengan definisi Wechel & Kimberly dalam Widjonarko (2007), yaitu sebagai jumlah uang yang bersedia dibayarkan oleh individu untuk mendapatkan suatu barang atau jasa layanan. Sementara secara khusus untuk jasa pelayanan sampah, Santosa, Darsono dan Syafrudin (2010) memberikan definisi kemauan membayar atau yang biasa disebut dengan *willingness to pay* sebagai kesediaan pengguna untuk mengeluarkan imbalan atas jasa yang diperolehnya atau besaran rupiah rata-rata yang masyarakat mau

mengeluarkannya sebagai pembayaran atas satu unit pelayanan sampah yang dinikmatinya.

METODE PENELITIAN

Rancangan Penelitian

Penelitian ini dirancang untuk mengetahui pengaruh langsung kualitas tingkat pelayanan, kemampuan membayar, tarif retribusi sampah, kemauan membayar terhadap penerimaan retribusi sampah serta pengaruh tidak langsung kualitas tingkat pelayanan, kemampuan membayar, tarif retribusi sampah, kemauan membayar terhadap penerimaan retribusi sampah di Kabupaten Badung, dengan metode analisis jalur. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif dan data sekunder dari kuisioner.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis jalur (*path analysis*) merupakan perluasan dari analisis regresi linier berganda untuk menaksir hubungan kausalitas antar variabel (*model causal*) yang diolah dengan menggunakan program SPSS. Suyana Utama, 2012 menyebutkan bahwa dalam analisis jalur terdapat suatu variabel yang berperan ganda yaitu sebagai variabel independen pada suatu hubungan namun menjadi variabel dependen pada hubungan lain. Demikian juga Kerllinger (2002) menyebutkan bahwa dengan menggunakan analisis jalur akan dapat dihitung pengaruh langsung dan tidak langsung antar variabel.

Definisi Operasional Variabel

Variabel Penelitian	Definisi Operasional	Pengukuran Variabel	Skala Pengukuran
Variabel Terikat			
Hasil Penerimaan Retribusi Sampah (Y2)	Penerimaan Retribusi Sampah adalah persepsi responden tentang besar kecilnya jumlah hasil mungutan retribusi sampah yang diterima oleh Dinas Kebersihan dari masyarakat yang telah menerima pelayanan.	<ul style="list-style-type: none"> · Jumlah retribusi sampah · Jumlah objek yang terlayani · Besarnya tarif retribusi · Kondisi penerimaan retribusi saat ini 	Ratio
Variabel Bebas			
1. Kualitas Tingkat Pelayanan (X1)	persepsi masyarakat tentang tinggi rendahnya kualitas dan kuantitas pelayanan persampahan yang di lakukan oleh Dinas Kebersihan.	<ul style="list-style-type: none"> · Frekuensi pelayanan · Partisipasi masyarakat · Peralatan yang digunakan petugas · Kesulitan menjangkau lokasi yang dilayani 	Interval
2. Kemampuan Membayar (X2)	persepsi masyarakat tentang kesanggupan menerima pelayanan kebersihan untuk membayar retribusi sampah yang ditetapkan baginya	<ul style="list-style-type: none"> · Pendapatan masyarakat yang telah disisihkan · Keterlambatan masyarakat membayar · Subsidi silang 	Interval
3. Tarif Retribusi (X3)	persepsi masyarakat tentang kesesuaian tarif retribusi sampah yang selama ini dikenakan.	<ul style="list-style-type: none"> · Tinggi atau rendahnya tarif retribusi · Kesesuaian tarif dengan tingkat sampah pada yang dibuang masyarakat 	Ratio
4. Kemauan Membayar (Y1)	persepsi masyarakat tentang seberapa besar kemauan masyarakat yang menerima pelayanan kebersihan untuk membayar retribusi sampah.	<ul style="list-style-type: none"> · Kesadaran masyarakat untuk membayar · Penggunaan hasil kutipan · Kedatangan petugas yang mengutip retribusi sampah · Penolakan untuk membayar 	Interval

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaruh Kualitas Tingkat Pelayanan, Kemampuan Membayar, dan Tarif Retribusi Sampah terhadap Kemauan Membayar Sampah di Kabupaten Badung.

Berdasarkan hasil uji koefisien path ada dua persamaan yang terdapat nilai $P < 0,05$ maka berdasarkan *theory trimming* jalur-jalur yang nonsignifikan tersebut dibuang, sehingga diperoleh jalur yang signifikan yaitu: Pertama, kualitas tingkat pelayanan, kemampuan membayar, dan tarif retribusi sampah berpengaruh ke kemauan membayar sampah bersifat langsung (*direct*) tanpa melalui perantara. Kualitas tingkat pelayanan, kemampuan membayar, berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemauan membayar dengan koefisien path pengaruh langsung masing-masing sebesar 0,260; 0,598; sedangkan tarif retribusi sampah berpengaruh negatif dan signifikan dengan koefisien path pengaruh langsung sebesar -

0,375. Kedua, kemampuan membayar dan tarif retribusi sampah berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan retribusi sampah. Koefisien path bersifat langsung (*direct*) tanpa melalui perantara dengan koefisien path pengaruh langsung masing-masing sebesar 0,303 dan 0,718, maupun pengaruh tidak langsung melalui kemauan membayar sampah, dengan koefisien path pengaruh total masing-masing sebesar 0,393 dan 0,662.

Pengaruh Kualitas Tingkat Pelayanan, Kemampuan Membayar, Tarif Retribusi Sampah dan Kemauan Membayar terhadap Penerimaan Retribusi Sampah Di Kabupaten Badung.

Dalam penelitian ini terdapat pengaruh langsung. Pertama, pengaruh langsung kualitas tingkat pelayanan terhadap kemauan membayar sampah. Dalam penelitian ini, hubungan kualitas tingkat pelayanan dengan kemauan membayar sampah mempunyai pengaruh langsung dengan koefisien path

sebesar 0,260 dan P sebesar 0,013 lebih kecil dari 0,05. Ini berarti bahwa kualitas tingkat pelayanan berpengaruh langsung dan signifikan terhadap kemauan membayar sampah. Hal ini disebabkan karena semakin baik pelayanan yang diberikan petugas kebersihan maka masyarakat akan bersedia membayar atas jasa yang diberikan. Hal ini seperti yang diungkapkan Kotler (1997) yang mengatakan bahwa kepuasan dan ketidakpuasan konsumen terhadap jasa yang diberikan akan mempengaruhi tingkah laku konsumen selanjutnya. Hal ini juga sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Pratiwi & Prayitno (2005) tentang tingkat kepuasan atas pelayanan hotel yang menemukan ada dua variabel yang menentukan tingkat kepuasan pelanggannya, yaitu kualitas pelayanan dan tingkat harga kamar, dan masing-masing memberikan pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kepuasan konsumen. Penelitian serupa yang dilakukan oleh Salequzzaman, Sqadiqul dan Mostafa (2000), Nur As'adah, Supirin dan Syafrudin (2010), begitu juga Santosa, Darsono dan Syafrudin (2010) telah menemukan bahwa kinerja operasional pengelola sampah atau tingkat pelayanan pengelolaan sampah sangat mempengaruhi kemauan (*willingnessto pay*) masyarakat dalam membayar tarif retribusi sampah.

Kedua, pengaruh langsung kemampuan membayar terhadap kemauan membayar sampah. Dalam penelitian ini, kemampuan membayar mempunyai pengaruh langsung terhadap kemauan membayar sampah dengan koefisien path sebesar 0,598 dan P sebesar 0,012 lebih kecil dari 0,05. Hal ini disebabkan karena semakin besar nilai pendapatan seseorang maka akan semakin besar gaya pikulnya dan tentu akan semakin tinggi pula tingkat kemampuannya untuk membayar, dalam hal ini, tarif retribusi sampah. Dengan semakin tingginya kemampuan membayar maka seseorang akan rela untuk membayar, mengorbankan atau menukarkan sesuatu untuk memperoleh barang atau jasa (Widaningrum, 2007). Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian Yadnya (2005) yang menyatakan bahwa pendapatan masyarakat berpengaruh nyata dan positif terhadap partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah, sehingga dapat disimpulkan bahwa pendapatan masyarakat yang tinggi dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah. Hal ini juga sesuai dengan hipotesis dan penelitian yang dilakukan oleh Widaningrum (2007) yang menemukan bahwa kemauan membayar masyarakat dipengaruhi oleh dua faktor utama, yaitu penghasilan total keluarga dan jasa pelayanan yang diterimanya (untuk

masyarakat berpenghasilan menengah rendah), sementara tingkat kemauan membayar masyarakat berpenghasilan menengah sedang dan tinggi, ditentukan oleh faktor jasa pelayanan yang diterimanya dan penghasilan total keluarga. Menurut Justine (1996), nilai kemauan membayar pada pengelolaan sampah dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu tingkat pelayanan, persepsi masyarakat terhadap nilai manfaat dari pelayanan itu, dan penghasilan keluarga untuk daerah yang masyarakatnya berpenghasilan rendah.

Ketiga, pengaruh langsung tarif retribusi sampah terhadap kemauan membayar sampah. Dalam penelitian ini, tarif retribusi sampah berpengaruh langsung terhadap kemauan membayar sampah dengan koefisien path sebesar -0,375 dan nilai P sebesar 0,037 lebih kecil dari 0,05. Ini berarti bahwa tarif retribusi sampah berpengaruh secara langsung dan signifikan terhadap kemauan membayar sampah. Ini berarti bahwa semakin tinggi tarif retribusi sampah maka kemauan masyarakat dalam membayar sampah akan menurun. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh McIntosh (2003) yang menyebutkan bahwa kemauan membayar seseorang dalam skala rumah tangga (domestik) tergantung dari besaran tarif air bersih. Penelitian serupa juga dilakukan oleh Nur As'adah, et al (2010) yang menemukan bahwa efektifitas tarif retribusi sampah memberi pengaruh terhadap kemauan masyarakat dalam membayar tarif retribusi sampah, artinya bila tarif retribusi sampah mengalami kenaikan maka kemauan membayar retribusi sampah akan turun.

Keempat, pengaruh langsung kualitas tingkat pelayanan terhadap penerimaan retribusi sampah. Dalam penelitian ini, kualitas tingkat pelayanan berpengaruh langsung terhadap penerimaan retribusi sampah dengan koefisien path sebesar 0,438 dan nilai P sebesar 0,083 lebih besar dari 0,05. Ini berarti bahwa kualitas tingkat pelayanan berpengaruh secara langsung dan tidak signifikan terhadap penerimaan retribusi sampah. Ini disebabkan karena kurang kesadaran masyarakat dan masih berpikir bahwa masyarakat hanya berperan sebagai pihak yang dilayani, dan tidak perlu memberikan kontribusi apapun, termasuk melakukan pembayaran uang retribusi sampah, sehingga tidak mempengaruhi penerimaan retribusi sampah. Hasil ini tidak mendukung hasil penelitian Arizal (2003) yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh yang positif dan signifikan dari pelayanan pemerintahan di bidang kebersihan terhadap penerimaan retribusi kebersihan.

Kelima, pengaruh langsung kemampuan membayar terhadap penerimaan retribusi sampah.

Dalam penelitian ini, kemampuan membayar mempunyai pengaruh langsung terhadap penerimaan retribusi sampah dengan koefisien path sebesar 0,303 dan P sebesar 0,044 lebih kecil dari 0,05. Ini berarti bahwa kemampuan membayar berpengaruh langsung dan signifikan terhadap penerimaan retribusi sampah. Hal ini disebabkan karena semakin tingginya kemampuan membayar masyarakat terhadap retribusi sampah, maka kerelaan masyarakat untuk membayarnya akan muncul sehingga penerimaan retribusi sampah juga akan meningkat. Apabila tingkat kemampuan membayar masyarakat lebih rendah dari jumlah tarif yang telah ditetapkan, maka akan timbul keengganan untuk membayarnya karena mereka harus mengalihkan sebagian dana yang telah dialokasikan untuk keperluan lainnya di luar pembayaran retribusi sampah. Akibatnya, penerimaan retribusi sampah akan mengalami penurunan. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Arizal (2003) yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh yang positif dan signifikan dari tingkat penghasilan terhadap penerimaan retribusi kebersihan.

Keenam, pengaruh langsung tarif retribusi sampah terhadap penerimaan retribusi sampah. Besarnya tarif retribusi sampah sangat dipengaruhi oleh kemampuan membayar dari masyarakat (*Ability to Pay, ATP*). Menurut Ditjen Cipta Karya Departemen PU dalam Hartono (2006) besarnya retribusi sampah yang dapat ditarik dari masyarakat untuk setiap rumah tangga besarnya minimal 0,5 persen dan maksimal 1 persen dari penghasilan per rumah tangga perbulannya. Dalam penelitian ini, tarif retribusi sampah berpengaruh langsung terhadap penerimaan retribusi sampah dengan koefisien path sebesar 0,718 dan nilai P sebesar 0,030 lebih kecil dari 0,05. Ini berarti bahwa tarif retribusi sampah berpengaruh secara langsung dan signifikan terhadap penerimaan retribusi sampah. Ini berarti bahwa semakin tinggi tarif retribusi sampah yang dapat ditarik dari masyarakat maka penerimaan retribusi sampah juga akan meningkat. Begitu juga sebaliknya, apabila tarif yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah rendah maka penerimaan retribusi sampah akan menurun. Namun, hal ini akan berdampak pada pemberian pelayanan dari Dinas Kebersihan juga akan menurun. Hal ini seperti data penerimaan retribusi sampah di Kabupaten Badung dalam tahun 2009 dan tahun 2011, yang mengalami penurunan yang cukup berarti, sehingga kemungkinan akan mempengaruhi kemampuan Dinas Kebersihan dan Pertamanan dalam melakukan atau memberikan pelayanan pengelolaan sampah. Penelitian yang sesuai dilakukan oleh Nur As'adah, et al (2010) yang

menemukan bahwa tarif retribusi sampah memberi pengaruh terhadap penerimaan retribusi sampah, artinya bila tarif retribusi sampah mengalami kenaikan maka penerimaan retribusi sampah akan naik.

Ketujuh, pengaruh langsung kemauan membayar sampah terhadap penerimaan retribusi sampah. Kemauan membayar menurut Santosa, Darsono dan Syafrudin (2010) atau yang biasa disebut dengan *willingness to pay* merupakan kesediaan pengguna untuk mengeluarkan imbalan atas jasa yang diperolehnya atau besaran rupiah rata-rata yang masyarakat mau mengeluarkannya sebagai pembayaran atas satu unit pelayanan sampah yang dinikmatinya. Dalam penelitian ini, kemauan membayar sampah berpengaruh langsung terhadap penerimaan retribusi sampah dengan koefisien path sebesar 0,150 dan nilai P sebesar 0,089 lebih besar dari 0,05. Ini berarti bahwa kemauan membayar sampah berpengaruh secara langsung dan tidak signifikan terhadap penerimaan retribusi sampah. Ini berarti bahwa tingkat kemauan masyarakat untuk membayar retribusi sampah adalah sangat rendah, karena mereka merasa bahwa kegiatan pengelolaan sampah merupakan kegiatan wajib pemerintah yang tidak perlu dibayar, sehingga tidak mempengaruhi penerimaan retribusi sampah. Penelitian yang sesuai dilakukan oleh Soleha (2007) yang menemukan bahwa rendahnya keinginan masyarakat dalam membayar retribusi sampah adalah karena manajemen perencanaan yang tidak melibatkan masyarakat secara keseluruhan, pengelolaan keuangan yang tidak transparan di tingkat masyarakat, serta kurangnya komunikasi antara pimpinan masyarakat di tingkat atas dengan masyarakatnya.

Pengaruh Kualitas Tingkat Pelayanan, Kemampuan Membayar, dan Tarif Retribusi Sampah terhadap Penerimaan Retribusi Sampah Secara Tidak Langsung Melalui Kemauan Membayar Sampah di Kabupaten Badung.

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh beberapa pengaruh tidak langsung antara variabel bebas terhadap variabel terikat. **Pertama**, pengaruh tidak langsung kualitas tingkat pelayanan terhadap penerimaan retribusi sampah melalui kemauan membayar sampah. Menurut Wechel & Kimberly dalam Widjonarko (2007), kemauan membayar yaitu sebagai jumlah uang yang bersedia dibayarkan oleh individu untuk mendapatkan suatu barang atau jasa layanan. Untuk dapat memberikan kualitas pelayanan yang baik kepada pelanggan, perusahaan harus berusaha mengetahui terlebih dahulu apa yang dibutuhkan dan diinginkan oleh pelanggan yang

dilayani. Dalam penelitian ini, kualitas tingkat pelayanan mempunyai pengaruh tidak langsung terhadap penerimaan retribusi sampah melalui kemauan membayar sampah dengan koefisien path pengaruh total sebesar 0,477 dan P sebesar 0,084 lebih besar dari 0,05. Ini berarti bahwa kualitas tingkat pelayanan berpengaruh tidak langsung dan tidak signifikan terhadap penerimaan retribusi sampah melalui kemauan membayar sampah. Hal ini disebabkan karena meskipun frekwensi kegiatan pengambilan dan pengangkutan sampah yang dilakukan oleh petugas Dinas Kebersihan tinggi dan teratur dan kualitas pelayanan tersebut baik, namun masyarakat kurang memiliki kesadaran dalam melakukan pembayaran atas retribusi yang ditagih oleh petugas Dinas Kebersihan karena beranggapan bahwa pelayanan kebersihan sampah adalah tanggung jawab Pemerintah Daerah dan masyarakat tidak merasa perlu untuk membayar, sehingga hal ini tidak mempengaruhi jumlah penerimaan retribusi sampah. Hal ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Wibisono dalam Alfiandra (2009) yang menyatakan bahwa partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah secara tidak langsung adalah berupa keterlibatan dalam masalah keuangan, pemikiran dan material. Dengan demikian masyarakat seharusnya membayar retribusi sampah sebagai bentuk keikutsertaan atau partisipasi dalam pengelolaan sampah dan juga sebagai bentuk pembayaran kewajiban atas pelayanan yang telah diterimanya. Penelitian serupa juga dilakukan oleh Jakobson, et al, dalam Vitianingsih (2002) yang berpendapat bahwa konsepsi *willingness to pay (WTP)* atau kemauan membayar sangat bergantung pada preferensi dan kesadaran (*awareness*) individu berkaitan dengan manfaat atas penggunaan suatu barang.

Kedua, pengaruh tidak langsung kemampuan membayar terhadap penerimaan retribusi sampah melalui kemauan membayar sampah. Kemampuan membayar selain mempunyai pengaruh langsung juga mempunyai pengaruh tidak langsung terhadap penerimaan retribusi sampah melalui kemauan membayar sampah dengan koefisien path sebesar 0,393 dan P sebesar 0,045 lebih kecil dari 0,05. Ini berarti bahwa kemampuan membayar berpengaruh tidak langsung dan signifikan terhadap penerimaan retribusi sampah melalui kemauan membayar sampah. Hal ini disebabkan karena apabila masyarakat memiliki kemampuan untuk membayar retribusi sampah maka mereka akan memiliki kerelaan untuk membayar besarnya tarif retribusi yang ditarik oleh Dinas Kebersihan sesuai dengan pelayanan sampah yang telah diterimanya, maka hasil penerimaan retribusi

sampah akan meningkat. Penelitian ini seperti yang dilakukan oleh Sukirno (2005) yang menyatakan bahwa konsumen akan berusaha untuk memaksimalkan kepuasannya sesuai batas kemampuan keuangannya. Penelitian serupa juga dilakukan oleh Brotodihardjo (1978) yang menyatakan bahwa semakin besar nilai pendapatan seseorang maka akan semakin besar gaya pikulnya dan tentu akan semakin tinggi pula tingkat kemampuannya untuk membayar tarif retribusi sampah. Menurut Justine (1996), nilai kemauan membayar pada pengelolaan sampah dipengaruhi oleh penghasilan keluarga. Penelitian Widaningrum (2007) mengenai tingkat kemampuan dan kemauan membayar terhadap rumah susun menemukan bahwa kemauan membayar masyarakat dipengaruhi oleh penghasilan total keluarga.

Ketiga, pengaruh tidak langsung tarif retribusi sampah terhadap penerimaan retribusi sampah melalui kemauan membayar sampah. Dalam penelitian ini, tarif retribusi sampah berpengaruh tidak langsung terhadap penerimaan retribusi sampah melalui kemauan membayar sampah dengan koefisien path sebesar 0,662 dan nilai P sebesar 0,033 lebih kecil dari 0,05. Ini berarti bahwa tarif retribusi sampah berpengaruh secara tidak langsung dan signifikan terhadap penerimaan retribusi sampah melalui kemauan membayar sampah. Ini berarti bahwa besarnya tarif retribusi sampah yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah telah memperhatikan dan mempertimbangkan kemampuan ekonomi masyarakat, sehingga diharapkan akan ada kesadaran dari masyarakat untuk mau membayar besarnya tarif retribusi sampah tersebut. Akibatnya, tentu diharapkan penerimaan retribusi sampah akan semakin meningkat. Hal ini seperti pengutipan retribusi sampah di Kabupaten Badung yang dilakukan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 18 Tahun 1999 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan. Dimana jumlah tarif yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Badung sebagaimana diatur dalam peraturan ini telah memperhatikan dan mempertimbangkan berbagai faktor yang diperkirakan akan ikut mempengaruhi hasil pengutipannya, seperti tingkat pelayanan yang diberikan, kemampuan membayar masyarakat, sosialisasi mengenai pentingnya partisipasi masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat dan meningkatkan hasil pengutipan retribusi sampah.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan pembahasan sebelumnya, maka dapat disimpulkan beberapa hal. **Pertama**, kualitas tingkat pelayanan, kemampuan membayar, dan tarif

retribusi sampah secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemauan membayar sampah dan berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan retribusi sampah. **Kedua**, kualitas tingkat pelayanan berpengaruh langsung terhadap penerimaan retribusi sampah dan berpengaruh tidak langsung melalui kemauan membayar sampah. **Ketiga**, kemampuan membayar, tarif retribusi memiliki pengaruh langsung terhadap penerimaan retribusi sampah dan tidak langsung melalui kemauan membayar sampah secara signifikan. Jadi lintas pengaruh yang signifikan adalah dari kualitas tingkat pelayanan, kemampuan membayar, dan tarif retribusi sampah ke kemauan membayar sampah bersifat langsung (*direct*) tanpa melalui perantara. Dari kemampuan membayar dan tarif retribusi sampah berpengaruh ke penerimaan retribusi sampah bersifat langsung (*direct*) tanpa melalui perantara maupun tidak langsung melalui kemauan membayar sampah.

Saran

Berdasarkan pembahasan diatas ada beberapa saran yang diajukan bagi penelitian-penelitian selanjutnya. **Pertama**, Pemda disarankan tetap memberikan sosialisasi tentang program-program pengelolaan sampah yang ada seperti program gelatik, pemilahan sampah organik dan anorganik, menyediakan tempat penampungan sampah sendiri yang layak dan memadai dan sosialisasi mengenai peraturan yang telah ditetapkan bersama antara pengelola dan masyarakat. **Kedua**, masyarakat harus terus dimotivasi oleh pemerintah daerah untuk ikut berpartisipasi dalam pengelolaan sampah yang ada. **Ketiga**, diharapkan adanya peningkatan kualitas pelayanan dan pengangkutan sampah yang dilakukan oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan, dan diharapkan adanya peningkatan sosialisasi mengenai jumlah retribusi yang harus dibayarkan oleh masyarakat, sehingga pendapatan yang diterima dari retribusi sampah dapat ditingkatkan. Seperti penyebaran informasi besar jumlah retribusi sampah melalui media massa.

REFERENSI

Alfiandra, (2009), *Kajian Partisipasi Masyarakat yang Melakukan Pengelolaan Persampahan 3R di Kelurahan Ngaliyan dan Kalipancur Kota Semarang*, Tesis, Universitas Diponegoro, Semarang.

Allen Consulting Group (2003), *Funding Urban Public Infrastructure – Approaches*

Compared, Report for the Property Council of Australia, The Allen Consulting Group Pty Ltd.

Anonim, (2011), “Pemko Butuh Investor Kelola Sampah”, *Medan Bisnis*, Selasa, 18 Januari.

Arizal, SY., Arif, (2003), *Faktor-Faktor Sosiologis Yang Mempengaruhi Penerimaan Retribusi Kebersihan (Survei di Masyarakat Kecamatan Bangko Kabupaten Merangin Propinsi Jambi)*, Tesis, Universitas Indonesia, Jakarta.

Arikunto, Suharsimi, (1998), *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Edisi Revisi IV Cetakan Kesebelas, Jakarta : PT. Rineka Cipta.

Batinggi, Ahmad (1999), *Manajerial Pelayanan Umum*, Universitas Terbuka, Jakarta

BPS Kota Medan (2010), [www//medan kota.bps.go.id](http://www/kota.bps.go.id), diakses tanggal 1 Agustus 2011.

Brotodihardjo, R. S., (1978), *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, PT. Eresco, Jakarta.

Erlina, (2008), *Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen*, Edisi : 2, Usu Press, Medan.

Ghozali, Imam (2005), *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*, Edisi 3, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.

Gujarati, D. N., (1995), *Basic Econometrics*, McGraw-Hill, Inc., Singapore.

Hair, J. F., R. E., Anderson, R. L., Tatham, and W. C., Black (1995), *Multivariate Data Analysis with Readings*, Fourth Edition, Prentice-Hall International, Inc, New Jersey, USA.

Halim, Abdul, (2007), *Akuntansi Sektor Publik, Akuntansi Keuangan Daerah*, Edisi : 3, Jakarta.

Hartono, E., (2006), *Peningkatan Pelayanan Pengelolaan Sampah di Kota Brebes Melalui Peningkatan Kemampuan Pembiayaan*, Tesis, Universitas Diponegoro, Semarang.

Indriantoro dan Supomo, (1998), *Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen*, Edisi Pertama, BPFE, Yogyakarta

Justine, A. (1996), *Community Based Solid Waste Management And Water Supply Projects: Problems And Solution Compared A survey of the literature*, UrbanWaste Expertise Programme, Nieuwehaven, Netherlands.

Kotler, Philip, 1997, *Manajemen Marketing*, Edisi 2, BPFE, Yogyakarta

_____, 2001, *Manajemen Pemasaran: Analisis, Perencanaan, Implementasi, dan Kontrol*, PT Prehallindo, Jakarta.

Kuncoro, M. (2004), *Metode Kuantitatif: Teori dan Aplikasi untuk Bisnis dan Ekonomi*. Yogyakarta: UPP-AMP YKPN.

- _____, (2003), *Metode Riset untuk Bisnis & Ekonomi*, Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Keputusan MenPan No. 81/1993 Tanggal 25 Nopember 1993 tentang Pedoman Tata Laksana Pelayanan Umum.
- Lubis, A. Fatma & Adi, Syahputra (2008), *Pedoman Penulisan Proposal dan Tesis*, Program Magister Akuntansi Sekolah Pascasarjana USU, Medan.
- Masrofi, M. (2004), *Potensi dan Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah (Studi Kasus di Kota Semarang)*, Tesis, Universitas Diponegoro, Semarang.
- McIntosh, Arthur C., (2003), *Asian Water Supplies, Reaching the Poor Urban*, Asian Development Bank, London.
- Meidiana, Christia & Thomas Gamse (2010), “Development of Waste Management Practices in Indonesia”, *European Journal of Scientific Research*, Volume 40, No. 2, hal. 199 – 210.
- Munir, (2000), *Manajemen Pelayanan Publik*, Bina Aksara, Jakarta.
- Nur As’adah, S., Supirin, dan Syafrudin (2010), “Implikasi Kemauan Membayar Tarif Retribusi Sampah terhadap Kinerja Sistem Pengelolaan Sampah di Kawasan Pemukiman”, *Pilar*, Volume 2.
- Permana, I. (2005), *Analisis Teknologi Pengolahan Sampah Dengan Proses Hirarki Analitik Dan Metoda Valuasi Kontingensi (Studi Kasus Jakarta Timur)*, Tesis Program Pascasarjana IPB, Bogor.
- Pratiwi, Indah & Edi, Prayitno (2005), “Analisis Kepuasan Konsumen Berdasarkan Tingkat Pelayanan dan Harga Kamar Menggunakan Aplikasi Fuzzy dengan Matlab 3.5”, *Jurnal Ilmiah Teknik Industri*, Volume 4, No. 2, Desember 2005, hal. 66 – 77.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 8 Tahun 2002 tentang Retribusi Pelayanan Kebersihan.
- _____, Nomor 4 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Medan.
- Peraturan Daerah Kabupaten Badung No 21 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan.
- Resmi, Siti, (2007), *Perpajakan Teori & Kasus*, Salemba Empat, Buku I.
- Ruijgrok, E.C.M. & Nillesen, E.E.M. (2000), *The Socio Economic Value of Natural Riverbanks In The Netherlands*, Rotterdam, The Netherlands.
- Salequzzaman, M.D., Sqadiqul, A. and Mostafa, A, (2000), *Willingness to Pay For Community-Based. Solid Waste Management and Its Sustainability In Bangladesh*, Research Institute For Sustainability and Technology Policy, Murdoch University, Australia.
- Samboro, J., (2008), “Kajian Perilaku Konsumen Berdasarkan Teori Psikologi Behavioristik”, *adbis Jurnal Administrasi dan Bisnis*, Volume 2, Nomor 1, Juli, hal. 13 – 22.
- Santoso, Singgih, (1999), *SPSS (Statistical Product and Service Solution)*, PT Elex Media Komputindo, Gramedia, Jakarta.
- Santosa, D. Alexander, Suseno, Darsono, dan Syafrudin (2010), “Studi Kemauan Membayar Masyarakat untuk Peningkatan Pengelolaan Infrastruktur Persampahan (Studi Kasus Kota Semarang)”, <http://Pilar Journal.com/File Journal/2010, Vol 2, hal. 1 - 12>.
- Scott, J. Rubin (2004), *The Cost of Solid Waste and Wastewater Service in The United States*, NRWA, The United States of America.
- Silalahi (2002), “Otonomi Ditinjau Dari Aspek Sumber Daya Manusia”, *Otonomi Daerah Peluang dan Tantangan, Hasil Diskusi Terbatas Memperingati Sewindu Suara Pembaruan dan HUT Ke-50 Republik Indonesia*, Pustaka Sinar Harapan Suara Pembaruan, Jakarta.
- Soleha, Siti, (2007), *Peran Serta Masyarakat Dalam Pembayaran Retribusi Sampah di Kawasan Perumahan Kota Pekan Baru (Studi Kasus Kecamatan Lima Puluh)*, Tesis (S2) Program Pasca Sarjana, Institut Teknologi Sepuluh November, Surabaya.
- Subaidah, Sri, (2006), *Penetapan Tarif Restribusi Kebersihan Kabupaten Gresik*.
- Sudiby, Sidiq, (2006), *Pelayanan Air Bersih Melalui Kemitraan Pemerintah – Swasta (Studi Kasus: PDAM Kabupaten Semarang dan PT. Sarana Tirta Ungaran)*, Tesis, Universitas Diponegoro, Semarang.
- Sugiono, (2008), *Metode Penelitian Administrasi dilengkapi dengan Metode R&D*, Edisi Revisi, Cetakan ke 16, Alfabeta, Bandung.
- Sukirno, Sadono, (2005), *Mikroekonomi: Teori Pengantar*, Edisi Ketiga, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sularso, Sri, (2003), *Buku Pelengkap Metode Penelitian Akuntansi: Sebuah Pendekatan Replikasi*, Edisi 2003/2004, BPFE Yogyakarta.

- Tjiptono, Fandy, (1996), *Manajemen Jasa*, Penerbit Andi, Yogyakarta.
- Umar, Husein, (2003), *Metode Riset Akuntansi Terapan*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- _____, Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
- _____, Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah
- _____, Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997
- _____, Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- _____, Nomor 33 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah
- Vitianingsih, Th. Emma (2002), *Are The People in Semarang City Indonesia Willing To Pay for Cleaner Air*, National Center for Development Studies, The Australian National University.
- Wechel, Tamara, V. & Kimberly Vachal (2004) *Investment in Rural Roads: Willingness to Pay for Improved Gravel Road Service in Freight Transportation*. MPC Report NO.04-168.
- Mountain-Plains Consortium. North Dakota State University, Fargo, ND.
- Waluyo (2010), *Perpajakan Indonesia*, Edisi 9, Buku I, Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
- Wicaksono, Y. I., Bambang, R, dan Dianita, R. K., (2006), "Analisis Kemampuan Membayar Tarif Angkutan Kota (Studi Kasus Pengguna Jasa Angkutan Kota pada Empat Kecamatan di Kota Semarang)", *Pilar*, Volume 15, Nomor 1, April, hal. 31-35.
- Widaningrum, Dwi Indah (2007), *Identifikasi Kemampuan Membayar dan Kemauan Membayar Masyarakat Berpenghasilan Menengah Rendah (di Lokasi Rencana Pembangunan Rumah Susun Tamansari Kota Bandung)*, <http://www.kk.pl.itb.ac.id/ppk>, diakses tanggal: 29 Maret 2011
- Widjonarko, (2007), *Menuju Pembiayaan Prasarana Kota Berbiaya Tak Kembali (Studi Kasus Jalan Lokal Kota Semarang)*, Tesis, Program Studi Magister Teknik Sipil, Universitas Diponegoro, Semarang
- Yulianto, S., (2005), *Analisis Penerimaan Retribusi Pelayanan Kesehatan (Studi Kasus di Kabupaten Boyolali)*, Universitas Muhammadiyah, Surakarta.